PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan salah satu syarat yang sangat penting dalam rangka membangun/membentuk generasi penerus yang sehat, cerdas, dan kuat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayapura di bidang pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka membangun/membentuk generasi penerus yang sehat, cerdas, dan kuat sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibangun Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. bahwa agar Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat operasional maka perlu dibentuk susunan organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2001 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2001 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayapura.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayapura.
7. Satuan Organisasi adalah Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayapura.
8. Kepala Satuan Organisasi ialah Kepala Satuan Organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayapura.
9. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah

- Kabupaten Jayapura.
10. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua staf medik fungsional.
 11. Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan.
 12. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
 13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
 14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayapura.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayapura.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

RSUD merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pengobatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan medis;
 - b. penyelenggaraan Pelayanan Asuhan Keperawatan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
 - d. penyelenggaraan Pelayanan Rujukan;
 - e. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan;
 - g. penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi RSUD terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan;
 - e. Seksi Rekam Medis dan Perencanaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Direktur

Pasal 6

- (1) RSUD dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2), Direktur mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan dan menyusun program kerja;
 - b. mengorganisir pelaksanaan program kerja;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja;
 - d. mengawasi, mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan program kerja.

Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menjalankan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan perpustakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan dan menyusun program kerja di bidang administrasi umum, Kepegawaian,

- Keuangan, Kerumah-tanggaaan, Perlengkapan, dan Perpustakaan;
- b. mengorganisir pelaksanaan program kerja di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kerumah-tanggaaan, perlengkapan, dan perpustakaan;
 - c. melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kerumah-tanggaaan, perlengkapan, dan perpustakaan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan, kerumah-tanggaaan, dan perpustakaan dengan satuan kerja lain;
 - e. mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kerumah-tanggaaan, perlengkapan, dan perpustakaan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Keperawatan

Pasal 8

- (1) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, mutu keperawatan dan etika profesi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Seksi Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan pedoman kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bimbingan pelaksanaan kegiatan penyusunan program asuhan dan pelayanan keperawatan, logistik keperawatan serta meningkatkan pelaksanaan etika profesi keperawatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan standar asuhan keperawatan, logistik keperawatan, pembinaan etika profesi keperawatan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan;
 - d. melaksanakan penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - e. menyiapkan usulan penempatan tenaga keperawatan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Pelayanan

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan dipimpin seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis, penunjang medis dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan program pelayanan medis, logistik pelayanan medis, peningkatan etika profesi dan mutu pelayanan medis;
 - c. menyusun standar pelayanan medis, logistik pelayanan medis, peningkatan etika profesi